SKRIPSI

PENGARUH PROBABILITAS, TINGKAT INFLASI, NON PERFORMING FINANCE DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau Pekanbaru



DISUSUN OLEH

FAUZIAH MAILANDA PUTRI
NPM. 165210838

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, seiring berjalannya waktu banyak kesadaran masyarakat tentang ekonomi islam dan ingin melakukan kegiatan transaksi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama islam. Pada tahun 1991 di indonesia dididirikan bank syariah pertama indonesia yaitu bank muamalat indonesia, dan sejak saat itu bank syariah diindonesia semakin berkembang dengan pesat. Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif.

Aktivitas bank syariah adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpana dan menyalurkanya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Ada beberapa macam produk yang ditawarkan oleh bank syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat salah satunya yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah, pembiayaan berbasis jual beli yang terdiri dari murabahah, salam, dan istishna', dan pembiayaan berbasis sewa terdiri dari ijarah. Berdasarkan statistik perbankakan syariah.

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan iconatau mascot dari perbankan syariah yang dimana setiap lembaga keuangan syariah memiliki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembiayaan ini sebagai ciri khas. Idealnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang mendominasi pembiayaan lainnya. Meskipun pada tahun 2014 sudah ada peningkatan, namun pembiayaan lain masih lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqh dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Sementara itu, musyarakah adalah akad kerja sama diantara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, yaitu risiko terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi, (Veithzal, 2008).

Aset perbankan syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankkan syariah masih terjaga double

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

digit, dengan pangsa aset mencapai 5,96% terhadap perbankkan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,78% baik BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif.

Sebanyak 9 dari 34 bank syariah (14 BUS dan 20 UUS) mempunyai induk Bank Umum Konvensional (parent/ sister company). Salah satu program strategis OJK dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 – 2019 mendorong peningkatan komitmen induk bank syariah melalui peningkatan permodalan dan skala usaha, memperbaiki efisiensi melalui optimalisasi peran induk dan mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimum 10% aset BUK induknya.

Jika diamati, pertumbuhan bank umum syariah di Indonesia memang cukup mengesankan dibandingkan sejak awal berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Laba, NPF, BOPO, CAR dan SBIS berdasarkan data Bank Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2018 perkembangan instrumen laba bank umum syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank-bank Syariah di Indonesia Selama Tahun 2014-2018 (milyar rupiah)

Nama Bank Syariah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
BRI Syariah	3.970.205	4.881.619	6.068.912	6.457.375	6.436.017
BNI Syariah	11.242	15.044	17.765	20.494	23.597
Bank Syariah Mandiri	50.460	49.133	51.090	55.580	60.584
BCA Syariah	1.421,6	2.132,2	2.975,5	3.462,8	4.191,1
Panin Bank Syariah	2.581.882	4.736.314	5.620.680	6.346.929	6.542.901
Bank Victoria Syariah	859.944	1.076.761	1.075.681	1.212.690	1.262.926
Bank Syariah Bukopin	3.281.655	3.710.720	4.307.132	1.799.486	4.532.635

Sumber : Laporan Keuangan Bank umum syariah, 2019

Dapat dilihat dari tabel diatas perkembangan laba bank syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun masih tidak signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi positif yang ditinjau dari kemajuan pencapaian visi pengembangan yang ditetapkan Bank Indonesia. Sehingga percepatan peningkatan laba bank syariah akan lebih mudah untuk tercapai. Kemudian perkembangan laba yang cukup stabil dengan pola kenaikan yang konsisten menunjukkan perkembangan laba bank syariah merupakan keunggulan bagi performa bank syariah di Indonesia.

Menurut abdul (2013) rendahnya pembiayaan mudharabah menggambarkan bahwa operasi bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. bank syariah harus memperbasar pangsa produk mudharabah namun bank syariah kurang berminat menawarkan produk mudharabah sepenuhnya karena beberapa hal. Perlu adanya lembaga penjamin atas dana yang diberikan kepada pengusaha untuk memberikan rasa nyaman bagi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bank syariah. Dengan demikian kekhawatiran atas risiko ketidak pastian yang dihadapi oleh bank syariah dapat diminimalisir.

Tingginya volume transaksi Murabahah jika dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan Murabahah dinilai lebih mudah serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Dengan demikian, pembiayaan Murabahah merupakan produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Dikarenkan produk Murabahah dalam perbankan syariah relatif bisa menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat sehingga standar risiko kerugian sangat kecil, dibandingkan prinsip bagi hasil yang tingkat risiko dan kerugiannya sangat tinggi, dengan kelebihan Murabahah maka perbankan syari ‟ ah cenderung menjadikan Murabahah sebagai produk unggulan yang ditawarkan kepada nasabah.

Dana merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan. Semakin banyak dana yang didapatkan maka semakin besar pula dana yang akan dikeluarkan. Hal tersebut berlaku juga untuk perbankan syariah. Kegiatan utama pada bank syariah adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana yang diperoleh dari masyarakat ini digunakan untuk pembiayaan bank syariah salah satunya pembiayaan berbasis bagi hasil. Salah satu sumber dari dana bank syariah adalah simpanan DPK yang cukup berpengaruh pada kegiatan penyaluran pembiyaan pada bank syariah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sangat mungkin mengandung resiko di dalamnya, salah satunya adalah Non performing finance(pembiayaan bermasalah). Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan atau kendali nasabah peminjam (Siamat, 2005). Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. Besar kecilnya pembiayaan bermasalah (Non Performing Finance) ini menunjukan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004).

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengannon performing financing dan volume pembiayaan berbasis bagi hasil menunjukkan hasil yang beragam yaitu menurut Andraeny (2011) non performing financingtidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, sama halnya menurut Kurniawanti & Zulfikar (2014)non performing financing tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan. Begitupula menurut Palupi (2015) non performing financing tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

ROA penting bagi bank karena ROA digunakian untuk mengatur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar (husnan,2008).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan profitabilitas dan volume pembiayaan berbasis bagi hasil menunjukkan hasil yang beragam yaitu Giannini (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Gularso (2015)menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap debt financing (pembiayaan). Lain halnya menurut Astuty & Asri (2014) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Inflasi juga merupakan Salah satu yang mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kondisi perekonomian di indonesia yang selalu menarik perhatian perbankkan dalam menyalurkan pembiayaan. Ketika terjadi inflasi yang tinggi, maka nilai riil uang akan turun, keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain dengan membeli harta tetap seperti tanah dan bangunan, hal ini akan merugikan perbankkan, dengan berkurangnya dana yang masuk pada perbankkan dapat mengakibatkan berkurangnya pula likuiditas bank, yang berujung pada berkurangnya pembiayaan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan tingkat inflasi dan volume pembiayaan berbasis bagi hasil menunjukkan hasil yang beragam.Menurut Purwidianti & Hidayah (2014) tingkat inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM.Lain halnya menurut Astuty & Asri (2014) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini untuk mengetahui " **PENGARUH PROBABILITAS, TINGKAT INFLASI, NON PERFORMING FINANCE DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

VOLUME PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA".

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka prumusan masalah diatas adalah " Bagaimana probabilitas, tingkat inflasi, non performing finansial dan dana pihak ketiga mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Syariah di Indonesia."

1.3. Tujuan dan manfaat penulisan

1.3.1. Tujuan penulisan

Untuk mengetahui pengaruh probabilitas, tingkat inflasi, non perfoming finansial dan dana pihak ketiga terhadap volume bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia.

1.3.2. Manfaat penulisan

a. Bagi bank syariah indonesia

   Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan tau perbaikan evaluasi bagi bank syariah indonesia.

b. Bagi peneliti

   Dengan penelitian ini penulis mendapatkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi volume bagi hasil pada bank syariah indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan landasan teori yang terdiri dari analisis rasio keuangan, jenis-jenis analisis rasio keuangan, alasan penggunaan analisis rasio keuangan, tujuan analisis rasio keuangan, keunggulan analisis rasio keuangan, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, serta diuraikan juga penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai variabel penelitian, penentuan sampel yang dipilih, jenis dan sumber data yang digunakan dalam peneltian, metode pengumpulan data serta penjelasan mengenai metode analisi data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan dibahas mengeani sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan profil perusahaan Sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bab ini berisi hasil dna pembahasan mengenai pengaruh probabilitas, tingkat inflasi, non perfoming finansial dan dana pihak ketiga terhadap volume bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang mana berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak- pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Lembaga Keuangan

Menurut Siamat (2004:47) Lembaga keuangan yaitu badan usaha yang kekayaannya itu terutama dalam berbentuk asset keuangan dibandingkan dengan asset finansial atau asset riil.

Menurut Kasmir (2005:9) Lembaga keuangan adalah untuk setiap perusahaan yang berada di bidang keuangan dimana kegiatannya, hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana.

Menurut Wijaya (2000:6) Lembaga keuangan didefinisikan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga di setiap perusahaan yang berada dalam bidang keuangan. Dimana mempunyai kegiatan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Menurut Sawitri (2007:1-2), lembaga keuangan mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut:

a. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit
b. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana

c. Memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu:

1) Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain (nasabah).

2) Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya

d. Memberikan jaminan

Lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.

e. Menciptakan dan memberikan likuiditas

Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu yang dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo.

2.2. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimoun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Kasmir (2004:11) Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

Menurut Kuncoro (2002:68) Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebtu ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Naf'an (2014: 21) perbankan syariah atau perbankan islam (al-Mashrafiyah al-Islam iyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya ber-dasarkan hukum Islam (syariah). Pembetukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank syariah menawarkan jasa yang umumnya dijalankan oleh lembaga deposito seperti jasa leasing, serta deposito bagi hasil yang umumnya ditawarkan oleh lembaga investasi semacam modal ventura. Bank Umum Syariah menghimpun dana melalui (1) simpanan yang berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wa'diah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, (2) investasi yang berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu penyaluran dana dilakukan dengan akad *mudharabah*, murabahah, qardh, serta ijarah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Beberapa ahli mengungkapkan tujuan dari bank syariah dengan berbeda-beda. Menurut Handbook of Islamic Banking (dikutip dari Naf'an 2014: 26) perbankan Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupaykan instrumen-instrumen jeuangan (Finansial Instrumen) yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariah.

Menurut Sudarsono (2008:43) bank syariah mempunyai beberapa tujuan, sebagai berikut:

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur ghahar (tipuan), di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang per-antara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan
f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Menurut Sudarsono (2008:44) ciri-cirinya sebagai berikut:

1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam bentuk wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3) Di dalam kontrak-kontrak deposito proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.

4) Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimoan dianggap sebagai titipan (al-wadi'ah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamantkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya, selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana di ambil pemiliknya.

Menurut Antonio (2001: 226) tujuan pengembangan perbankan syariah adalah untuk memenuhi beberapa kebutuhan berikut:

a) Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga
b) Peluang deposito bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan
c) Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.3. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. (Dr. Muhammad syafii antonio, M. Ec.)

Pembiayaan atau Financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan perbankan syariah menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003).

2.3.1. Akad yang digunakan bank syariah

Berbagi jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu :

a. Akad Pola titipan

Akad berpola titipan (wadi'ah) ada dua, yaiutu wadi'ah yard amanah dan wadi'ah yard dhamanah.

- Titipan wadiah yad amanah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah atau kepercayaan, baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

- Titipan wadi'ah yad dhamanah "tangan amanah" kemudian berkembang prinsip yadh-dhamanah "tangan penanggung" yang berarti pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.

b. Akad pola pinjaman

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankkan syariah adalah Qardh dan turunannya Qardhul hasan. Pinjaman qardh merupakan pinjaman tanpa bungan.

Qardh merupakan pinjaman atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian bangrang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).

Rukun dari akad qardh atau qadhul hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:

- Pelaku akad, yaitu muqtaridh (peminjam), pihak yang membutuhkan dana , dan muqridh (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
- Objek akad, yaitu qardh (dana)
- Tujuan, yaitu 'iwad atau countervalue berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp.X,- dikembalikan Rp.X,-)
- Shighah, yaituijab dan qabul

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Akad pola bagi hasil

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah (trustee profit sharing) dan musyarakah (joint venture profit sharing). Prinsipnya adalah al-ghunm bi'l-ghurm atau al-kharaj bi'l-daman, yangberarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi rill harus ada biaya ekonomi rill (khan, 1995).Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh usmani (1999), adalah sebagai berikut :

- Bagi hasil tidak berarti meminjam uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikut sertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya
- Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapay berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

1) Musyarakah

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua mitra atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Proporsi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal disertakan (pendapat imam malik dan imam syafi'i).

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Namun perjanjian musyarakah dapat diakhiri denganatau tanpa menutup usaha.

2) Mudharabah

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dan atau modal (shahibul mal/rabbul mal) menyediakan modal (seratus persen) kepada pengusaha sebagai pengelola (mudharib) , umtuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad .Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memilii modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau enterpreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapitidak memiliki modal.

d. Akad pola jual beli

1) Akad murabahah

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjualan menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu :

- Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- Objek akad, yaitu mabi' (barang dagang) dan tsaman (harga)
- Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.

2) Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari (advance payment atau forward buying atau future sale) dengan harga , spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalamperjanjian.

Salam diperbolehkan oleh rasulullah SAW. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluerganya sampai waktu panen tiba.

Salam bermanfaat bagi penjualkarena mereka menerima pembayaran dimuka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah dari pada dengan akad tunai.

e. Akad pola sewa

Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah. Ijarah, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan adalah akad yang dilakukan atas adsar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah istilah dalam fiqih islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut sayyi sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfat dengan jalan penggantian.

Ada dua jenis ijarah dalam hukum islam, yaitu:

1) Ijarah yang berhubungan dengan swa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta'jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayar disebut ujrah.
2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing(sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyewa(lessee) disebut musta'jir, pihak menyewakan (lessor) disebut mu'jir/ muajir, sedangkan biaya sewa disebut ujrah.

f. Akad pola lainnya

1) Wakalah

Wakalah (deputyship), atau biasadisebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yangboleh diwakilkan. Atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

2) Kafalah

Kafalah (guaranty) adalah jaminan, beban, atau, tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful). Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

3) Hawalah

Hawalah (transfer service) adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/ menerimanya.

4) Rahn

Rahn (mortgage) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

5) Sharf

Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Produk jasa perbankan yang menggunakan akad sharf adalah fasilitas penukaran uang (money charger).

6) Ujr

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad ujr diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (fee based services), seperti untuk penggajian, penyewaan safe deposit box, pengguna Atm dan sebagainya.

2.3.2. Jenis jenis pembiayaan bank syariah

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a. Mudharabah

Mudharabah adalah kerja sama antara dua atau lebih dari pihak pemilik (shahibul maal), yang mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola(mudharib).

Mudharabah adalah perjanjian diawal antara penyedia modal dengan pengusaha, bahwa setiap keuntungan yang diraih, akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risisko kerugian ditanggung penuh oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian yang diakibatkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.

Kontrak mudharabah dalam bank syariah, memosisikan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dengan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan(profit).

b. Musyarakah

Musyarakah (syirkah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil, dimana dua orang atau lebih mengumpulkan dana pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu , dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama, dengan memadukan seluruh sumber daya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (ba'i)

a. Murabahah

Murabahah dalam konotasi islam pada dasarnya berarti penjualan. Penjualan pada murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diperoleh pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa nominal keseluruhan (lump sum) atau berdasarkan persentase.

Murabahah dalam lembaga keuangan merupakan perjanjian jual beli antara lembaga keuangan syariah termasuk bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dana dari pemilik modal baik LKS maupun bank syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama.

b. Pembiayaan Salam

Pembiayaan jual-beli di mana barang yang diperjual-belikan belum ada. Pembayaran barang dilakukan di depaqn oleh bank namun penyerahan barang dilakukan secara tangguh karena memerlukan proses pengadaannya. Setelah barang diserahkankepada bank maka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bank akan menjualnya epada pembeli yang telah nenesan sebelumnya. Hal ini disebut salam paralel karena melibatkan pemesan dan bank, serta bank dan pelaksana yang bertanggung jawab atas realisasi pesanan tersebut.

c. Pembiayaan Istisna

Istishna adalah suatu transaksi jual beli antara mustashni' (pemesan) dengan shani'i (produsen) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas.

Secara etimologis, istishna itu adalah minta dibuatkan. Dengan demikian menurut jumhur ulama istishna sama dengan salam, karena dari objek atau barang yang dipesannya harus dibuat terlebih dahulu dengan ciri-ciri tertentu seperti halnya salam. Bedanya terletak pada sistem pembayarannya, kalau salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima, sedang istishna boleh di awal, di tengah atau diakhir setelah pesanan diterima.

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa

a. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaatnya selama periode akad, serta memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (ujrah).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bitamlik/Wa Iqtina

Pembiayaan ijarah muntahiya bitamlik adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak yang menyewa.

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Bank Syariah

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11). Faktor- faktor yang mempengaruhi kredit bank syariah sebagai berikut :

a. Pengaruh Profitabilitas terhadap pembiayaan bank syariah

Menurut Brigham & Houston (2010:107) profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan.Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah ROA (return on asset).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS dan Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kesehatan Bank (2012:184, 153-154) return on asset (ROA) merupakan salah satu rasio penunjang yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam penunjang yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Menurut Muhamad (2014:254) ROA (return on asset) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Adapun kriteria penilaian peringkat ROA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat	Kriteria Keterangan
1	ROA > 1,5% Sangat Memadai
2	1,25% < ROA ≤ 1,5% Memadai
3	0,5% < ROA ≤ 1,25% Cukup Memadai
4	0% < ROA ≤ 0,5% Kurang Memadai
5	ROA ≤ 0% Tidak Memadai

Berdasarkan teori stewardship, pengelola dana (mudharib) menjaga kepercayaan pemilik dana (shahibul maal) dengan mengelola dana yang dititipkan salah satunya dalam bentuk penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Semakin tinggi laba artinya semakin tinggi pendapatan bank.Salah satu sumber pendapatan bank umum syariah diperoleh dari bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah (pembiayaan berbasis bagi hasil). Laba yang semakin tinggi akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap bank

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

umum syariah. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka penghimpunan dana dari masyarakat akan semakin meningkat pula. Peningkatan dana yang dihimpun akan sebanding dengan peningkatan dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi pula volume pembiayaan salah satunya pembiayaan berbasis bagi hasil.

b. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap pembiayaan bank syariah

Menurut Madura (2007:128) inflasi merupakan kenaikan dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum selama periode waktu tertentu. Tingkat inflasi dapat diestimasikan dengan mengukur persentase perubahan dalam indeks harga konsumen yang mengindikasikan harga dari sejumlah besar produk konsumen seperti produk kebutuhan sehari-hari, perumahan, bahan bakar, layanan kesehatan, dan listrik.

Ketika tingkat inflasi dalam kondisi tinggi maka pihak bank akan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Inflasi akan dapat mempengaruhi simpanan atau tabungan masyarakat. Harga barang/jasa yang terus menerus mengalami kenaikan akan membuat simpanan masyarakat semakin menurun untuk dapat membeli barang yang diinginkan. Simpanan masyarakat pada bank syariah yang semakin rendah akan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat inflasi akanmenyebabkan semakin rendah simpanan masyarakat pada bank syariah yang dapat berdampak pada volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang semakin rendah pula.

Inflasi adalah peningkatan harga secara keseluruhan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara arus uang dan barang. Terjadinya inflasi dikarenakan adanya inflasi di luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang di dalam negeri.

c. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan bank syariah

Non performing financing (NPF) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan macet dengan keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, yang dinyatakan data bentuk persentase. Data mengenai jumlah NPF diperoleh dari data laporan keuangan (kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya.

Menurut Riyadi & Yulianto (2014) non performing financing merupakan pembiayaan macet yang sangat berpengaruh pada laba bank syariah.Jika non performing financing menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan bank syariah akan meningkat sehingga dapat meningkatkan laba. Menurut Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kesehatan Bank (2012:179) non performing financing

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan rasio penunjang yang digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank.Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Tabel 4.
Kriteria penilaian non performing financing(NPF)

Peringkat	Kriteria
1	NPF < 2 %
2	2 % ≤ NPF < 5 %
3	5 % ≤ NPF < 8 %
4	8 % ≤ NPF < 12 %
5	NPF ≥ 12 %

Pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak bank. Pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan semakin rendahnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan bagi bank syariah khususnya pendapatan yang berasal dari pembiayaan. Potensi pendapatan yang semakin rendah akan menyebabkan laba pada bank syariah juga akan semakin menurun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Andraeny (2011) peningkatan non performing financingakan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk di dalamnya pembiayaan berbasis bagi hasil. Dengan demikian semakin tinggi non performing financing maka akan semakin rendah volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

d. Pengaruh Dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bank syariah

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Dana masyarakat memegang peran yang sangat besar dalam menopang usaha bank dan merupakan andalan bagi bank. Agar bank memperoleh dana masyarakat maka bank harus memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa dana yang mereka simpan di bank akan aman dengan arti lain bahwa dana masyrakat dapat ditarik sesuai syarat- syarat yang telah di perjanjikan dan disetujuui oleh kedua belah pihak, serta bunganya dibayarkan tepat waktu.

Sebagaimana halnya bank konvensional, Bank Syariah memainkan peran yang sangat vital dan strategis. Eksistensi Bank Syariah dapat dijadikan sebagai salah satu satu dari indikator perkembangan ekonomi Islam. Semakin besar market share perbankan syariah, maka semakin banyak komponen dalam masyarakat yang menggunakan berbagai transaksi syariah. Komposisi sumber dana yang dihimpun Bank Syariah setidaknya terdiri dari tiga komponen, yaitu modal, pinjaman antar bank dan DPK. Sebagaimana halnya dalam perbankan konvensional, dana yang terhimpun dari masyarakat merupakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

komponen terpenting dalam penghimpunan dana (funding) di dunia perbankan.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa,"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Menurut Antonio (2001) dan Muhammad (2007) salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK. Meningkatnya DPK lalu juga berpengaruh terhadap meningkatnya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil periode berikutnya. Tingginya porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh bank syariah. Karena adanya aset yang tersedia di bank syariah berhubungan positif dengan tingkat penyaluran produk pembiayaan bagi hasil. Salah satu cara yang dapatdilakukan bank syariah untuk meningkatkan jumlah aset melalui penghimpunan dana dari masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak DPK yang diperoleh dari masyarakat semakin tinggi pula pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat. (Rahmat, 2012)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.5. Penelitian terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.
Penelitian terdahulu

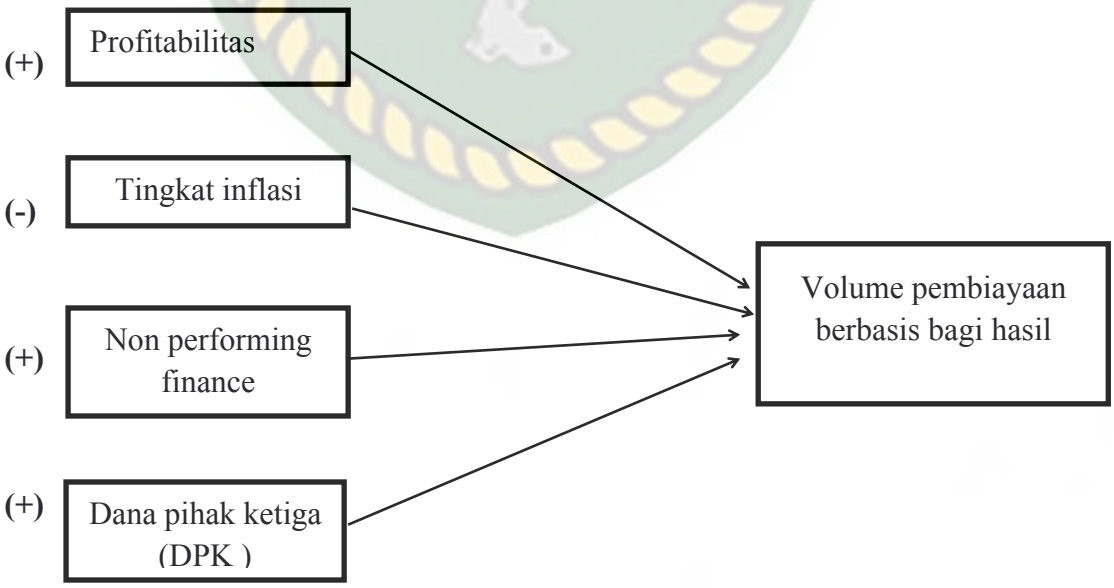
No	Nama peneliti	Judul penelitian	Permasalahan penelitian	Metode analisis	K e s i m p u l a n
1	try widyasti	Faktor–faktor yang mempengaruhi volume perdagangan saham pada bank yang terdaftar di bursa efek indonesia	Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Risiko, dan Nilai Perusahaan terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	kuantitatif	Dari pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Profitabilitas tidak memiliki pengaruh positif terhadap volume perdagangan saham pada bank. 2) Tingkat risiko tidak memiliki pengaruh negatif terhadap volume perdagangan saham pada bank. 3) Nilai perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap volume perdagangan saham pada bank.
2	Isnaini fajrin nadia palupi	Analisis pengaruh risiko pasar, risiko kredit, tingkat risiko bank, non performing financing dan modal terhadap volume perdagangan saham pada bank yang terdaftar di bursa efek indonesia	Pengaruh risiko pasar, risiko kredit, tingkat risiko bank, non performing financing, modal terhadap volume perdagangan saham bank	Kuantitatif	1) Variabel risiko pasar, risiko kredit, tingkat risiko bank, non performing financing, modal berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham bank. 2) Variabel risiko pasar, risiko kredit, tingkat risiko bank, non performing financing berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham bank. 3) Variabel risiko pasar, risiko kredit, tingkat risiko bank, non performing financing, modal berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham bank. 4) Variabel modal secara berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham bank.
3	Warto, R. Bambang budhijana	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Perbankan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2011- 2013	Pengaruh pertumbuhan tenaga kerja indonesia, dana pihak ketiga, non performing financing terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah	kuantitatif	Secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah di Indonesia. Variabel NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel pembiayaan yang disalurkan. Variabel SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia. Secara simultan variabel DPK, NPF dan SBIS berpengaruh signifikan terhadap variabel PYTD Bank Syariah Indonesia.
4	Ida ayu aisshwarya rai, ni ketut purnawati	Faktor – faktor yang mempengaruhi kredit pada bank umum swasta nasional (BUSN) devisa	Faktor pengaruh DPK, CAR, NPL, SBI, dan Tingkat Suku Bunga Kredit terhadap besarnya penyaluran kredit pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa di Indonesia	kuantitatif	D a n a P i h a k Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kredit pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa selama periode 2011 - 2015. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar DPK maka kredit yang disalurkan juga besar. Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kredit pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa selama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

					periode 2011 - 2015.
5		Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia	Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), pada Pembiayan Bagi hasil bank syariah di Indonesia	kuantitatif	Berdasarkan analisis regresi data panel, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. b. Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. c. Non Performing Financing (NPF) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. d. Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial memiliki pengaruh signifikan kearah positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

2.6. Kerangka penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan permasalahan yang diangkat maka kerangka penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut :



2.7. Hipotesis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini " profitabilitas, tingkat inflasi, non performing finansial dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan objek penelitian

Lokasi dan objek dalam penelitian ini adalah seluruh bank syraiah indonesia yang memiliki data keuangan yang datanya dapat diperoleh dari pusat informasi bank indonesia (BI) dan otoritas jasa keuangan (OJK) melalui website resmi.

3.2. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah periode 2014-2018.

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan *(annual report)* Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh website resmi masing-masing bank pada tahun 2014-2018, sampel sebanyak N= 33. Kriteria-kriteria tersebut antara lain adalah:

a. Bank Umum Syariah yang beroprasi secara nasional dan terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2014-2018.
b. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report)* selama periode penelitian yaitu tahun periode 2014-2018.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diatas, maka terdapat 7 BUS yang memenuhi kriteria tersebut. Sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Daftar Sampel Penelitian

No.	Nama Perusahaan
1.	BRI Syariah
2.	BNI Syariah
3.	Bank Syariah Mandiri
4.	BCA Syariah
5.	Panin Bank Syariah
6.	Bank Victoria Syariah
7.	Bank Syariah Bukopin

3.3. Operasional variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Volume pembiayan berbasis bagi hasil	Pembiayan berdasarkan akad bagi hasil berdiri dari pembiayan murabahah dan musyarakah	Bagi hasil= murabahah + musyarakah	Rasio
Profitabilitas	Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit		Rasio

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tingkat inflasi	Kenaikan dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum selama periode waktu tertentu		Rasio
Non performing finance	Rasio perbandingan yang digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank		Rasio
Dana pihak ketiga (DPK)	Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat		Rasio

3.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk jadi dan dipublikasikan.

   a. Data-data dari pusat kepustakaan BI dan OJK

      Data tersebut adalah laporan-laporan keuangan dan data-data yang menyangkut pembiayaan

   b. Internet

      Adapun yang menjadi situs dari pencarian data yang berhubungan dengan tema atau penelitian ini, seperti www.bi.go.id, dan sebagainya.

2. Riset kepustakaan

   Riset kepustakaan adalah melakukan studi kepustakaan dengan pengumpulan data yang dilengkapi dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis literature yang bersumber dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber.
4. Mengambil data dari Ojk untuk melengkapi dan memperkuat data hasil penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dengan metode statistik untuk menguji apakah profitabilitas, tingkat inflasi dan non performing financing sebagai variabel independen memiliki pegaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai variabel. Untuk itu sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi kalsik yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi..

1. Uji asumsi klasik

   Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan betul-betul terbebas adari bias sehingga hasil regresi yang diperoleh tidak valid, perlu dilakukan pengujian yang disebut uji asumsi klasik. Jika uji asumsi klasik tidak dipenuhi maka variable-variable yang menjelaskan menjadi tidak efisien. Model regresi yang diperoleh dari metode OLS (ordinary least square method) merupakan metode regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias terbaik (best linier unbias estimatore blue). Jika dipenuhi beberapa asumsi klasik tersebut.

   a) uji normalitas data

      Normalitas data merupaakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis multivariantive jika variasi yang dihasilkan dari distribusi data

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang tidak normal, maka tes statistik yang dihailkan tidak valid selanjutnya normalitas dibutuhkan dalam melakukan uji statistik F dan L dan kedua pengujian ini dilakukan pada penelitian ini.

dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari gari diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji autokorelasi

Autokorelasi terjadi bila ada korelasi antara anggota sample yang diturunkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada abservasi yang menggunakan data time series. Kosekuensi adanya autokorelasi ini adalah varian sampel tidak dapt menggambarkan varian populasinya dan model regresi yang dihasilkantidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependenya pada nilai variable independen tertentu, autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi diantara angota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu (apabila data time series) atau korelasi antara temapat berdekatan (apabila cross sectional). Adapun uji yang adapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik ini adalah uji durbin watson (D-W start) dengan ketentuan sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) 1.54 < DW < 2.46 maka tidak ada autokorelasi
2) 1.21 < DW < 1.54 atau 2.46 < DW < 2.79 maka tidak dapat disimpulkan.
3) DW < 1.21 Atau DW > maka terjadi autokorelasi

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regeresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. Jika VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2006).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode statistik berupa uji glejser dengan meregresi nilai absolut residual (ABS_RES) terhadap variabel dependen. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen maka indikasi terdapat problem heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

2. Analisis Regresi Berganda

Uji regresi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

digunakan untuk menjawab bagaimana pengaruh profitabilitas, tingkat inflasi dan non performing financing terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Model yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Keterangan:

Y = volume pembiayaan berbasis bagi hasil

a = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi variabel ROA

b_2 = Koefisien regresi variabel tingkat inflasi

b_3 = Koefisien regresi variabel NPF

b_4 = Koefisien regresi variabel DPK

X_1 = ROA

X_2 = tingkat inflasi

X_3 = NPF

X_4 = DPK

e = error

3. Uji Determinasi Koefisien (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keterikatan atau keeratan variabel untuk variabel dependen yaitu profitabilitas, tingkat inflasi dan non performing financing sebagai variabel independen memiliki pegaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Koefisien korelasi berganda biasanya diberi simbol dengan R^2. Dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persamaan regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka nilai R^2 yang baik digunakan untuk menjelaskan persamaan regresi adalah koefisien determinasi yang disesuaikan karena telah memperhitungkan jumlah variabel independen dalam suatu model regresi. Nilai koefisien determinasi R^2 untuk menunjukkan persentase tingkat kebenaran suatu prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan (Ghozali, 2005).

4. Uji Hipotesis

Metode terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan pengujian secara parsial menggunakan uji t dan pengujian secara simultan menggunakan uji F. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independent secara individual dalam menerangkan variable dependent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen (Ghozali, 2006)

Penelitian ini akan menguji pengaruh variable pembiayaan bagi hasilterdiri dari kompetensi dan independensi terhadap variabel dependen yaitu kualitas hasil audit. Alat uji yang digunakan untuk menguji hubungan variabel tersebut adalah uji t dan uji F. Uji t bertujuan untuk menguji apakah variabel independen (kompetensi dan independensi) secara parsial atau individual terhadap variabel dependen (kualitas hasil audit). Uji F dilakukan untuk menguji adanya pengaruh variabel

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

independen (kompetensi dan independensi) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (kualitas hasil audit).

a. Uji parsial (uji t)

Uji parsial t (uji t) merupakan uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variable terikat (mudjarad. 2009:238).setelah diketahui adanya pengaruh variable-variable independen terhadap variable dependen secara bersama-sama, selanjutnya perlu diketahui apakah semua variable independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Untuk mengetahui hal itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan uji t.

Pengujian dilakukan dengan dua arah (two tail) dengan tingkat keyakinan 95% dan dilakukan uji tingkat signifikansi pengaruh hubungan variable independen secara individual terhadap variable dependen, dimana tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5% dan *degree of freedom* (df)= n-k.

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak dengan kata lain variable independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen. Begitu juga sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

b. Uji simultan (uji F)

Uji simultan F menunjukkan apakah semua variable bebas yang terdapat dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terhadap variable terkait (Mudrajad 2009:239). Uji F dilakukan pada hipotesis pertama yaitu untuk mengetahui apakah variable independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisi uji F ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} namun sebelum membandingkan nilai F tersebut, harus ditentukan tingkat kepercayaan (1-) dan derajat kebebasan / degree of freedom {n- (k+1)} agar dapat ditentukan nilai kritisnya. Alpah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.05 dengan hipotesis dua sisi (two tail). Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau Pvalue >, maka H_0 dan H_a ditolak dan hasilny tidak signifikan. Hal ini berarti variable independen secara bersam-sama tidak mempunyai hubungan dengan variable dependen. Sebaliknya jika apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau Pvalue <, disebut signifikan karena H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti variable independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh dengan variable dependen.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan

(liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperolehperhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Landasanhukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil"pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincianlandasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan DewanPerwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebutmenjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwaterdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*),yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga(BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2014-2018 yang dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi insiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

4.2. Gambaran Umum Bank Syariah

4.2.1. BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRIsyariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRIsyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRIsyariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRIsyariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRIsyariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Aktivitas PT Bank BRIsyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRIsyariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRIsyariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRIsyariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.

4.2.2. BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

4.2.3. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4.2.4. BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Komposisi kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut :

1. PT Bank Central Asia Tbk.: 99.9999%
2. PT BCA Finance : 0.0001%

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi HALO BCA di 1500888.

BCA Syariah hingga saat ini memiliki 64 jaringan cabang yang terdiri dari 11 Kantor Cabang (KC), 12 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Fungsional (KF) dan 38 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang dan Malang (data per Des 2018).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.2.5. Panin Bank Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ("Panin Dubai Syariah Bank"), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

Panin Dubai Syariah Bank hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan transaksi syariah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Perbankan syariah Indonesia adalah perbankan yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik muslim maupun non muslim.

Perbankan Syariah dengan logo iB (baca ai-Bi) adalah ikon atau singkatan dari Islamic Banking (di Indonesia dikenal dengan Perbankan Syariah) dengan menawarkan produk serta jasa bank yang lebih beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Produk titipan maupun investasi Panin Dubai Syariah Bank dijamin sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nilai maksimal Rp.2 miliar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Visi Panin Bank Syariah menjadi Bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif untuk semua. Sedangkan **misi** Panin Bank Syariah antara lain :

1. Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, komprehensif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah
2. Berkontribusi dalam pertumbuhan industri perbankan Syariah di Indonesia
3. Mengembangkan kompetensi SDI sejalan dengan kebutuhan industri melalui pelatihan dan pemenuhan tenaga ahli perbankan syariah
4. Menerapkan kerangka kerja tata kelola perusahaan dan pengendalian internal yang kuat dalam rangka perlindungan nasabah dan para pemangku kepentingan.
5. Menciptakan nilai bagi *shareholder*

4.2.6. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Angggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah degan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan di catat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

4.2.7. Bank Bukopin Syariah

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperolah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperolah izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil analisis data dengan metode penelitian yang digunakan. Sehingga perumusan masalah pada bab I akan dapat dijawab melalui hasil pengujian tersebut.

5.1. Analisis Variabel Penelitian

5.5.1. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun djalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefiisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Sehingga semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat dalam suatu bank membawa konsekuensi semakin besar resiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit yang disalurkan bermasalah, bank akan mengalami

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat (Umam, 2013: 256). Alasan peneliti ingin mengkaji penelitian tentang pembiayaan karena, pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memegang peranan strategis dalam mobilisasi sumber-sumber keuangan sehingga dapat menggerakkan sektor rill. Berikut dapat dilihat jumlah pembiayaan bank-bank syariah di Indonesia selama tahun 2014-2018, yaitu :

Tabel 5.1
Jumlah Pembiayaan Bank-bank Syariah di Indonesia Selama Tahun 2014-2018 (milyar rupiah)

Nama Bank Syariah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
BRI Syariah	3.970.205	4.881.619	6.068.912	6.457.375	6.436.017
BNI Syariah	11.242	15.044	17.765	20.494	23.597
Bank Syariah Mandiri	50.460	49.133	51.090	55.580	60.584
BCA Syariah	1.421,6	2.132,2	2.975,5	3.462,8	4.191,1
Panin Bank Syariah	2.581.882	4.736.314	5.620.680	6.346.929	6.542.901
Bank Victoria Syariah	859.944	1.076.761	1.075.681	1.212.690	1.262.926
Bank Syariah Bukopin	3.281.655	3.710.720	4.307.132	1.799.486	4.532.635

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2020

Dari data tersebut bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Jenis pembiayaan pada bank syaruah ini adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan paling besar dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri dan pembiayaan paling kecil oleh BCA Syariah. Seluruh pembiayaan yang disalurkan sebagian besar berasal dari *murabahah* (pembiayaan jual beli) dibandingkan dengan pembiayaan yang berasal dari pembiayaan dengan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berbeda dengan presepsi umum yang menganggap bahwa bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan bisnis berdasarkan bagi hasil.

5.1.2. Return On asset (ROA)

Return On asset (ROA) adalah rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahan menghasilkan laba pada masa lalu. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan menyalurkan dana dengan lebih luas.

Tabel 5.2
Return On asset (ROA) Bank-bank Syariah di Indonesia Selama Tahun 2014-2018 (milyar rupiah)

Nama Bank Syariah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
BRI Syariah	1.15	0.08	0.77	0.95	0.51
BNI Syariah	1.37	1.27	1.43	1.44	1.31
Bank Syariah Mandiri	1.52	0.03	0.56	0.59	0.59
BCA Syariah	1.0	0.8	1.0	1.1	1.2
Panin Bank Syariah	1.03	1.99	1.14	0.37	10.77
Bank Victoria Syariah	0.50	1.87	2.36	2.19	0.36
Bank Syariah Bukopin	0.69	0.27	0.79	1.12	0.02

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2020

5.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembanngan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Bank Indonesia menetapkan inflasi yang dimiliki oleh bank minimal 8%. Apabila

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ketentuan inflasi tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan akan mengurangi kemampuan ekspansi penyaluran dana.

Tabel 5.3
Inflasi Bank-bank Syariah di Indonesia Selama Tahun 2014-2018 (milyar rupiah)

Nama Bank Syariah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
BRI Syariah	14.49	12.89	13.94	20.63	20.29
BNI Syariah	16.23	16.26	15.48	14.92	20.14
Bank Syariah Mandiri	14.10	14.12	12.58	14.01	15.89
BCA Syariah	22.4	29.6	34.3	36.7	29.4
Panin Bank Syariah	20.83	25.69	20.30	18.17	11.51
Bank Victoria Syariah	18.40	15.27	16.14	15.98	19.29
Bank Syariah Bukopin	11.10	14.80	16.31	15.15	19.20

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2020

5.1.4. Non perfoming Financing (NPF)

Non perfoming Financing (NPF) mencerminkan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank. Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. karena besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (pembiayaan).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 5.4
Non perfoming Financing (NPF) Bank-bank Syariah di Indonesia Selama Tahun 2014-2018 (milyar rupiah)

Nama Bank Syariah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
BRI Syariah	3.26	3.65	3.89	3.19	4.72
BNI Syariah	1.13	1.04	1.46	1.64	1.50
Bank Syariah Mandiri	2.28	4.29	4.05	3.13	2.71
BCA Syariah	0.0	0.1	0.5	0.2	0.04
Panin Bank Syariah	0.77	0.29	1.94	1.86	4.83
Bank Victoria Syariah	3.31	4.75	4.82	4.35	4.08
Bank Syariah Bukopin	3.68	3.34	2.74	4.66	4.18

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2020

5.1.5. Dana Pihak Ketiga (FDR)

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana pihak ketiga memiliki kontibusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuanya dalam menyalurkan kredit. Kredit diberikan kepada debitur yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak bank. Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Biasanya DPK akan sangat mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Tabel 5.5
Dana pihak ketiga (FDR) Bank-bank Syariah di Indonesia Selama Tahun 2014-2018 (milyar rupiah)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nama Bank Syariah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
BRI Syariah	102.70	93.90	84.16	81.47	71.87
BNI Syariah	97.86	92.60	91.94	84.57	80.21
Bank Syariah Mandiri	89.37	82.13	81.99	79.19	77.66
BCA Syariah	83.5	91.2	91.4	90.1	88.5
Panin Bank Syariah	90.40	94.04	96.43	91.99	86.95
Bank Victoria Syariah	84.65	95.91	95.29	100.67	83.59
Bank Syariah Bukopin	100.29	92.89	90.56	88.18	82.44

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah, 2020

5.2. Analisis Data

Sebelum analisis data menggunakan regresi linier dilakukan, maka terlebih dahulu harus memenuhi asumsi-asumsi penafsiran parametrik dan koefisien regresi agar tidak bias dan mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Sehubungan dengan itu, sebelum dilakukan pengujian terhadap analisa data dan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dalam analisis regresi tersebut. Asumsi analisis regresi yang akan diuji adalah uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas dan heterokedastisitas.

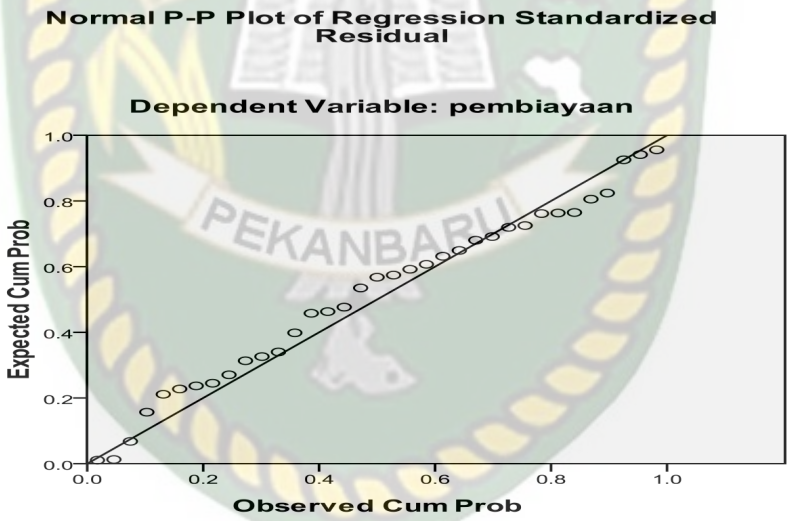
1. Uji Normalitas Data

Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk melihat normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari normal probability plot. Jika data menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya jika data tersebar acak tidak berada disekitar garis diagonal, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada penelitian ini, pengujian terhadap normalitas data berdasarkan data awal belum terpenuhi dimana pada grafik normal probability plot ditunjukkan bahwa data yang menyebar tidak seluruhnya berada disekitar garis diagonal. Setelah transformasi data dilakukan maka normalitas model regresi penelitian ini terlihat grafik normal probability plot berikut ini:

Gambar 5.1.
Hasilk Uji Normalitas



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti pola distribusi normal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data. Sehingga uji statistik F dan uji statistik t dapat dilakukan untuk menguji hipotesis.

2. Uji Asumsi Klasik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam penggunaan regresi terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik. Beberapa uji asumsi klasik yaitu:

a. Autokorelasi

Autokorelasi adalah kondisi dimana kesalahan pengganggu saling berkorelasi (berhubungan). Autokorelasi ini terjadi bila ada korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Pengujian yang umum digunakan untuk melihat keberadaan autokorelasi adalah dengan menggunakan Durbin Watson (DW). Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 5.7
Hasil Perhitungan Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.654[a]	.428	.352	1.88056	1.988

a. Predictors: (Constant), FDR, inflasi, ROA, NPF

b. Dependent Variable: pembiyaan

Berdasarkan dari hasil uji autokorelasi tersebut diketahui bahwa dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 sebanyak 35 sampel dan jumlah variable independen 5 variabel, maka dw terletak diantara du dan 4-du. Data du sebesar 1,988 sehingga 4-du sebesar 2,4738 dan hasilnya diperoleh 1,988 < 2,258 < 2,4738.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan demikian, bahwa dalam model regresi baik karena dw terletak diantara du dan 4-du sehingga tidak terjadi autokorelasi.

b. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan memiliki hubungan antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat adanya multikolinieritas. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Batasan nilai VIF untuk masing-masing nilai variabel adalah 10. Jika nilai VIF dari hasil penelitian lebih dari 10 maka variabel tersebut memiliki pengaruh multikolinieritas. Sebaliknya jika VIF dibawah angka 10 maka dianggap bebas dari pengaruh multikolinieritas. Nilai tolerance dan VIF dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut.

Tabel. 5.8
Hasil Perhitungan Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	ROA	.954	1.049
	inflasi	.529	1.891
	NPF	.512	1.951
	FDR	.933	1.072

a. Dependent Variable: pembiyaan

Sumber : Data Olahan, 2020

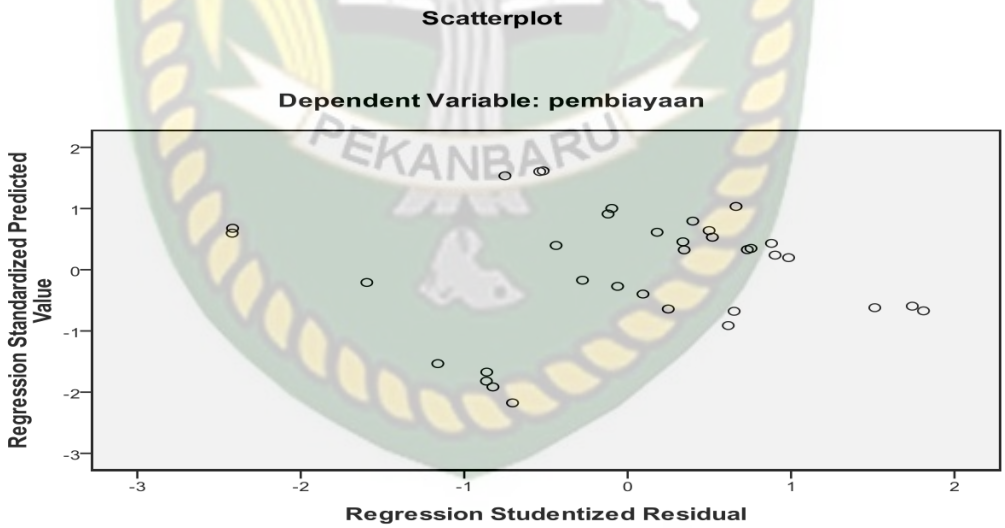
Berdasarkan tabel 5.8 dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya pengaruh multikolinieritas. Nilai VIF variabel independen dibawah angka 10 dan mempunyai tolerance mendekati angka 1.

c. Heterokedastisitas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Uji heterokedastisitas dilakukan pada model yang telah bebas asumsi autokorelasi dan multikolinieritas. Pengujian heterokedastisitas adalah dengan mengamati grafik scatter plot. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat heterokedastisitas. Jika titik-titiknya tidak membentuk suatu pola yang jelas dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat pengaruh heterokedastisitas. Dari gambar 5.2 dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat adanya gejala heterokedastisitas.

Gambar 5.2
Hasil Uji Heterokedastisitas



5.3. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan metode enter, dimana semua variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel independen. Dalam penelitian ini model regresi yang digunakan adalah model regresi berganda, yaitu dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menggunakan variabel-variabel. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 5.9 :

Tabel. 5.9
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.561	1.030		4.238	.005
	ROA	.121	.188	.016	.113	.911
	inflasi	.070	.073	.184	.968	.341
	NPF	.730	.278	.507	2.630	.013
	FDR	.252	.538	.214	2.094	.046

a. Dependent Variable: pembiyaan

Sumber : Data Olahan, 2020

Sesuai dengan hasil analisis regresi pada tabel 5.9 maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$Y= 3.561 + 0.121X_1 + 0.070X_2 + 0.730X_3 + 0.252X_4$

Maka dengan kata lain persamaan regresi diatas dapat didefenisikan sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

βo = 3.561, dapat diartikan sebagai besarnya pembiayaan bila ROA, inflasi, NPF dan FDR adalah 0.

β_1 = 0.121 maka dapat diinterpretasikan bahwa ROA jika naik 1 satuan, maka pembiayaan akan naik sebesar 0.121 satuan dengan asumsi variable lain tetap.

β_2 = 0.070, maka dapat diinterpretasikan bahwa jika inflasi naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan akan naik sebesar 0.070 satuan dengan asumsi variable lain tetap.

β_3 = 0.730, maka dapat diinterpretasikan bahwa jika NPF naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan akan naik sebesar 0.730 satauan dengan asumsi variable lain tetap.

β_4 = 0.252, maka dapat diinterpretasikan bahwa jika FDR naik sebesar 1 satuan, maka pembiayaan akan naik sebesar 0.252 satuan dengan asumsi variable lain tetap.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ROA, inflasi, NPF dan LDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

5.4. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi berguna untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan bersama-sama variabel dependen.

Tabel. 5.10
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	.695[a]	.483	.394	1.81886	1.826

a. Predictors: (Constant), FDR, inflasi, ROA, NPF

b. Dependent Variable: pembiayaan

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diketahui bahwa R^2 pada penelitian ini adalah sebesar 0.483 (48,3%). Dengan demikian besarnya pengaruh variabel ROA, inflasi, NPF dan FDR terhadap pembiayaan adalah sebesar 48,3 % dan 51,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan oleh peneliti. Untuk mengetahui variabel independen yang pengaruhnya saling dominan terhadap pembiayaan dapat dilihat dari koefisien persamaam regresi masing-masing variabel atau dari tingkat signifikannya.

5.5. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis maka dilakukan dua pengujian yaitu uji parsial (t) dan uji simultan (F). Uji parsial (t) dilakukan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua, yaitu untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan uji simultan (F) dilakukan untuk menguji hipotesisi ketiga, yaitu untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dan pembahasan masing-masing hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian secara parsial (t)

Pengujian variabel secara parsial (individual) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis yang pertama dan kedua. Dengan tingkat keyakinan 95% dan dengan pengujian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dua arah serta tingkat signifikan sebesar 5% maka dinyatakan ketentuan menolak Ho adalah dengan cara melihat t signifikan dimana jika t signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Adapun hasil perhitungan uji t maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 5.11
Hasil Analisis Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.561	1.030		4.238	.005
	ROA	.121	.188	.016	.113	.911
	inflasi	.070	.073	.184	.968	.341
	NPF	.730	.278	.507	2.630	.013
	FDR	.252	.538	.214	2.094	.046

a. Dependent Variable: pembiyaan

Sumber : Data Olahan, 2020

Pengaruh ROA terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,911 dan besar dari 0,05 maka H0 ditolak, berarti ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan.

Pengaruh inflasi terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,341 dan besar dari 0,05 maka H0 ditolak, berarti inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengaruh NPF terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,013 dan kecil dari 0,05 maka H0 diterima, berarti NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan.

Pengaruh FDR terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,046 dan kecil dari 0,05 maka H0 diterima, berarti FDR berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan.

Beradasarkan hasil uji t yang dilakukan dari keempat variable maka dapat disimpulkan dari kelima variable yang berpengaruh terhadap pembiayaan yaitu NPF dan FDR sedangkan ROA dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

2. Pengujian secara simultan (F)

Untuk mengetahui apakah variabel ROA, inflasi, NPF dan FDR secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan dapat diketahui dengan melakukan uji F atau dengan uji ANOVA. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel}, dengan tingkat keyakinan 95% atau dengan taraf nyata (a) adalah 5%. Adapun hasil statistic uji F yaitu :

Tabel. 5.12
Hasil Analisis Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79.456	4	19.864	5.617	.002[b]
	Residual	106.096	30	3.537		
	Total	185.552	34			

a. Dependent Variable: pembiyaan

b. Predictors: (Constant), FDR, inflasi, ROA, NPF

Sumber : Data Olahan, 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima, sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka Ho diterima dan Ha ditolak. Pada uji ANOVA yang telah dilakukan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 5.617 dengan nilai F_{tabel} sebesar 3.031 (5.617 > 3.031). Sehingga diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, secara bersama-sama variabel ROA, inflasi, NPF dan FDR memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan. Keputusan ini didukung oleh P-value yang berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,002 dimana secara statistik nilai ini sangat signifikan. Dengan demikian hipotesis kelima dapat diterima dan dibuktikan.

5.6. Pembahasan

5.6.1. Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Pengaruh ROA terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,152 dan besar dari 0,05 maka H0 ditolak, berarti ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Saryadi (2012) yang menyatakan ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan.

Peningkatan *Return on Asset* (ROA) dapat meningkatkan pembiayaan perbankan. Jika *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan tinggi maka bank telah menggunakan aktivanya secara optimal untuk memperoleh pendapatan. Apabila *Return On Asset* (ROA) meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 1998).

5.6.2. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hipotesis kedua menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Pengaruh inflasi terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,858 dan besar dari 0,05 maka H0 ditolak, berarti inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Saryadi (2012) yang menyatakan inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan.

Inflasi adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Inflasi merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya (Dendawijaya, 2001).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Werdaningtyas (2002), meneliti tentang faktor yang memengaruhi pembiayaan bank *take over* pramerger di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah variabel Inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

5.6.3. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Pengaruh NPF terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,005 dan kecil dari 0,05 maka H0 diterima, berarti NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan. Hasil penelitian ini sesuai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan penelitian yang dilakukan Fauziyah Adzimatinur (2015) yang menyatakan NPF memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan.

Non perfoming Financing (NPF) mencerminkan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank. Menurunnya pendapatan bank akan berpengaruh terhadap menurunnya modal yang dimiliki oleh bank. karena besarnya modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada besarnya ekspansi dalam penyaluran dana (pembiayaan).

5.6.4. Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan

Hipotesis keempat menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Pengaruh FDR terhadap variabel pembiayaan dengan melihat t signifikan harga sebesar 0,056 dan kecil dari 0,05 maka H0 diterima, berarti FDR berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tri Budi Utami (2016) yang menyatakan FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan.

FDR yang memberikan pengaruh negatif terbukti dengan data yang menunjukkan semakin menurunnya rasio pada sektor konstruksi. FDR diduga memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap pembiayaan karena dilihat dari data yang ada, pembiayaan terus mengalami peningkatan. Selain itu, FDR merupakan dana yang digunakan untuk pembiayaan, maka seiring dengan meningkatnya FDR, akan meningkatkan pembiayaan itu sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis data yang telah dikemukakan dalam data sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dan sekaligus dalam mencapai tujuan penelitian ini.

1. Hasil uji t yang dilakukan dari keempat variable maka dapat disimpulkan dari kelima variable yang berpengaruh terhadap pembiayaan yaitu NPF dan FDR sedangkan ROA dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
2. Hasil nilai R^2 pada penelitian ini adalah sebesar 0.483 (48,3%). Dengan demikian besarnya pengaruh variabel ROA, inflasi, NPF dan FDR terhadap pembiayaan adalah sebesar 48,3 % dan 51,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan oleh peneliti.

3. Hasil Pada uji F diperoleh nilai nilai F_{hitung} sebesar 5.617 dengan nilai F_{tabel} sebesar 3.031 (5.617 > 3.031). Sehingga diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, secara bersama-sama variabel ROA, inflasi, NPF dan FDR memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan.

6.2. Saran

Dengan hasil yang telah disimpulkan, penulis memberikan beberapa saran demi perbaikan-perbaikan terhadap para peneliti selanjutnya yaitu :

1. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. *Intellectual capital* memiliki kontribusi yang besar pada peningkatan kinerja perusahaan, diharapkan perusahaan dapat lebih meningkatkan kualitas dan pengelolaan modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Saran berikutnya bagi perusahaan yaitu untuk lebih berhati-hati mengambil keputusan yang berkaitan dengan hutang dan kepemilikan saham oleh manajer, dikarenakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hutang dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk para investor dan manajer disarankan untuk menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai salah satu referensi mengambil keputusan sehingga dapat mengetahui keuntungan yang akan diperoleh dalam investasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Agus Sartono. 2001. *Manajemen Keuangan "Teori dan Aplikasi"*. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta

Atmaja, Lukas Setia. 2002. *Manajemen Keuangan Edisi Revisi* Penerbit Andi. Yogyakarta

Bambang Sugeng. 2009. *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Struktur Modal terhadap Kebijakan Inisiasi Dividen di indonesia, Jurnal Ekonomi Bisnis,* Tahun 14. No.1.

Brigham, E F, dan Houston, J F,. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Buku Kedua. Edisi Kesepuluh. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Brigham, E F,. 2005. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedelapan. Buku Pertama. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Dewi Astuti. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan.* Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.

Hartijo Agus, Martono D. 2004 *Manajemen Keuangan Edisi Pertama* Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta

Hatta, A J. 2002. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen : Investigasi Pengaruh Teori Stakeholder. *JAAI* Volume 6 No 2, Desember 2002.

Husnan, S., dan Pudjiastuti, E. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Keempat. Yogjakarta : Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.

Husnan, Suad. 1998. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Jangka Panjang) Edi keempat.* BPFE. Yogyakarta

Indriyo Gitosudarmo dan Basri. 2002. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Mulyono, Sri. 2006. *Statistika Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi ketiga.* Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI. Jakarta

Sitanggang. 2012. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.

Sutrisno. 2001. *Manajemen Keuangan "Teori, Konsep dan Aplikasi"*. Yogyakarta: Ekonosia

Weston, J Fred., Thomas E Copeland. 1997. *Manajemen Keuangan.* Alih bahasa oleh Jaka Wasana & Kibranoko. Jakarta : Penerbit Binarupa Aksara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :